

DAMPAK KERJASAMA LUAR NEGERI OLEH PEMERINTAH DAERAH TERHADAP PENINGKATAN KEAMANAN EKONOMI (Studi Kasus: Implementasi Program Saemaul Undong di Provinsi Yogyakarta)

Fadhlan Nur Hakiem

Universitas Darussalam Gontor
fadhlanhakiem@unida.gontor.ac.id

Novi Rizka Amalia

Universitas Darussalam Gontor
novirizka@unida.gontor.ac.id

Abstract

This research aims at explaining the impact of international cooperation on economic security. This impact is expected to be illustrated through the implementation of the Program of Saemaul Undong. The program is an international cooperation between Yogyakarta Province and Gyeongsangbuk-do Province, South Korea. The research method used in this research was the Mixed Methods done through the triangulation technique. The object of research was the society in Bleberan village, Gunung Kidul Regency, and Sumbermulyo village, Bantul Regency. The technique of data collection implemented in this research were literature review, in-depth interviews, and survey. The technique of data analysis in

this study was to perform data reduction, data categorization, synthesis, and formulating working hypotheses. The results recognized that the Saemaul Undong Program had an impact on economic security. This program has provided increased economic security. However, this research has also shown that this impact was not significant. It is because economic growth has not been evenly distributed. Therefore, it can be concluded that international cooperation was able to provide benefits to economic security.

Keywords: *International Cooperation; Local Government; Human Security; Saemaul Undong*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dampak kerjasama luar negeri terhadap peningkatan keamanan ekonomi masyarakat. Dampak tersebut diharapkan dapat tergambarkan melalui implementasi program Saemaul Undong sebagai manifestasi dari kerjasama luar negeri Provinsi Yogyakarta dengan Provinsi Gyeongsangbuk-do, Korea Selatan. Metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode campuran (mixed methods) dengan menggunakan strategi triangulasi. Objek penelitian dalam penelitian ini adalah masyarakat yang melaksanakan program Saemaul Undong yaitu desa Bleberan Kabupaten Gunung Kidul, dan desa Sumbermulyo, Kabupaten Bantul. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah wawancara yang terstruktur, survei, dan studi literatur. Teknik analisa data dalam penelitian ini adalah dengan melakukan reduksi data, kategorisasi data, sintesisasi, dan menyusun hipotesis kerja. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Program Saemaul Undong memberikan dampak terhadap keamanan ekonomi, dimana terjadi peningkatan ekonomi masyarakat. Namun, penelitian ini

juga menunjukkan bahwa dampak dari program tersebut belum berjalan maksimal, dimana peningkatan ekonomi belum berjalan secara merata. Berdasarkan hal tersebut maka dapat disimpulkan bahwa kerjasama luar negeri mampu memberikan manfaat secara langsung terhadap keamanan ekonomi.

Kata Kunci: *Kerjasama luar negeri; Pemerintah Daerah; Keamanan ekonomi; Saemaul Undong*

Pendahuluan

Dinamika hubungan internasional berkembang dengan sangat pesat. Perkembangan tersebut tidak terlepas dari perubahan yang terjadi pada konstelasi politik internasional. Tercatat dalam tiga dasawarsa terakhir, beberapa fenomena internasional seperti berakhirnya perang dingin dan globalisasi telah menyebabkan perubahan mendasar bagi dinamika hubungan internasional. Perubahan tersebut ialah semakin meluas dan mendalamnya aktor dan *issue* dalam hubungan internasional. Perluasan dan pendalaman tersebut menyebabkan aspek-aspek *low politics* (*economics issues, environment issues, cultural issues*) yang selama ini dinilai tidak signifikan menjadi sama pentingnya dengan aspek-aspek *high politics* (*military and political issues*). Selain itu, fenomena tersebut juga mendorong aktor-aktor non-pemerintah dan aktor-aktor sub-negara untuk semakin aktif terlibat dalam dinamika hubungan internasional.

Salah satu hal penting yang terjadi karena perluasan dan pendalaman tersebut adalah menguatnya pengakuan terhadap peran strategis dari aktor sub-negara khususnya pemerintah kota, kabupaten, dan provinsi dalam pemenuhan agenda-agenda

pembangunan internasional. Menurut Meadowcroft dalam Isnaeni disebutkan bahwa Pemerintah Kota dinilai sangat penting karena merupakan unit pemerintah yang paling dekat dengan masyarakat (Isnaeni, 2013). Menurut Tavares, meskipun kota atau aktor sub-negara lainnya dapat dianggap kurang sebagai suatu wilayah, tetapi sebagai ruang dimana aliran global - *capital, information, people, good, and services* – kota mengalami persilangan dan semakin solid sebagai aktor internasional baru (Tavares, 2016).

Aktor sub-negara khususnya kota menjadi semakin penting karena wilayah tersebut menampung lebih dari setengah populasi dunia. Kondisi tersebut tidak terlepas dari fenomena urbanisasi yang terjadi. UN-Habitat dalam Tavares memperkirakan bahwa pada tahun 2050, lebih dari 75% penduduk dunia akan tinggal di kota (Tavares, 2016). Meningkatnya populasi kota memberikan tantangan bagi pemerintah daerah. Persoalan serius yang dihadapi adalah masalah keamanan ekonomi. Perlindungan keamanan ekonomi menjadi salah satu yang krusial dan harus selalu diperhatikan oleh pemerintah daerah.

Salah satu cara yang dilakukan oleh pemerintah daerah baik kota atau provinsi dalam menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi adalah dengan menjalin kerjasama luar negeri. Kerjasama luar negeri yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, dinilai sebagai salah satu cara yang strategis dalam menyelesaikan berbagai persoalan yang dihadapi. Jaringan Kerjasama yang dibangun oleh pemerintah daerah dinilai sebagai satu cara yang efektif untuk memperkuat kapasitas daerah yang bertujuan untuk memecahkan masalah-masalah sosial dan lingkungan, serta memberikan pelayanan publik yang lebih memadai bagi masyarakatnya (Isnaeni, 2013).

Kerjasama luar negeri yang dilakukan oleh pemerintah daerah menjadi salah satu bentuk kebijakan yang relatif populer di Indonesia. Bentuk kerjasama tersebut mengalami peningkatan sejak Orde Reformasi berlangsung di Indonesia. Menurut *treaty database* Kementerian Luar Negeri, setidaknya terdapat lebih dari 70 kerjasama luar negeri yang melibatkan pemerintah daerah (*Data Perjanjian Luar Negeri*, n.d.). Tercatat beberapa Provinsi dan Kabupaten/Kota seperti Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Yogyakarta, Surabaya, Bandung, telah melaksanakan berbagai kerjasama luar negeri. Salah satu bentuk kerjasama luar negeri yang banyak dilakukan oleh pemerintah daerah adalah dengan membangun kerjasama kota kembar atau provinsi kembar (*sister city/province*). Mayoritas dari kerjasama tersebut menitikberatkan pada kerjasama dibidang ekonomi (*Data Perjanjian Luar Negeri*, n.d.). Hal tersebut terjadi karena masalah ancaman ekonomi adalah ancaman yang serius bagi pemerintah daerah.

Tercatat bahwa banyak pemerintah daerah di Indonesia menjalin kerjasama luar negeri. Salah satu daerah yang rutin melakukan kerjasama luar negeri adalah Provinsi Yogyakarta. Yogyakarta memiliki banyak perjanjian kerjasama luar negeri. Dinas Perizinan dan Penanaman Modal Provinsi DIY mencatat bahwa Yogyakarta memiliki 31 kerjasama luar negeri sejak tahun 1985 sampai dengan tahun 2019 (Hakiem & Susilowati, 2020). Namun demikian, hingga tahun 2019, hanya 8 kerjasama luar negeri yang bertahan dan dapat ditindaklanjuti (*Kerjasama Luar Negeri Aktif*, n.d.). Salah satu kerjasama luar negeri yang bertahan dan potensial memberikan dampak bagi penyelesaian masalah daerah adalah program *Saemaul Undong* sebagai manifestasi dari

kerjasama provinsi kembar (*sister province*) antara Pemerintah Provinsi Yogyakarta dengan Pemerintah Provinsi Gyeongsangbuk-do, Korea Selatan.

Provinsi Yogyakarta melakukan *Memorandum of Understanding* (MoU) dengan Provinsi Gyengsangbuk-do pada tahun 2005. MoU tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan penandatanganan *Letter of Intent* (LoI) dengan provinsi tersebut pada tanggal 29 Mei 2008. LoI tersebut menegaskan kerjasama yang terkait dengan pembangunan pedesaan (*Saemaul Undong*) (*DIY - Gyeongsangbuk-Do, n.d.*). Kerjasama kedua provinsi semakin kuat dan mempertegas program *Saemaul Undong* dengan ditandatanganinya *Reaffirmation of the Memorandum of Understanding* pada tanggal 31 Agustus 2015 (*DIY - Gyeongsangbuk-Do, n.d.*).

Program *Saemaul Undong* dilakukan di beberapa desa di Yogyakarta. *Saemaul Undong* merupakan program yang menekankan pada Gerakan pengembangan masyarakat dalam membangun desa atau komunitas untuk meningkatkan kualitas hidup penduduknya berdasarkan pada spirit ketekunan, swadaya, dan kemandirian (*Korea Saemaul Undong Center, n.d.*). Program ini juga menekankan prinsip “dari, oleh, dan untuk” penduduk desa itu sendiri. Kerjasama luar negeri yang dilakukan Pemerintah Provinsi Yogyakarta melalui Program *Saemaul Undong* memiliki potensi untuk mendukung kesejahteraan, mendorong kemandirian, dan penguatan keamanan ekonomi masyarakat.

Berdasarkan implementasi program tersebut dapat dilihat bahwa daerah memiliki peran strategis dalam mendukung pemenuhan agenda pembangunan internasional. Dengan demikian, penelitian ini berusaha untuk menjelaskan sejauhmana

dampak kerjasama luar negeri yang dilakukan oleh pemerintah daerah terhadap keamanan ekonomi. Hal tersebut diharapkan dapat tergambarkan dengan jelas melalui implementasi program *Saemaul Undong* sebagai manifestasi dari kerjasama luar negeri antara Pemerintah Provinsi Yogyakarta dengan Pemerintah Provinsi Gyeongsangbuk-do, Korea Selatan. Hal ini menjadi signifikan untuk ditelaah karena kerjasama luar negeri yang dilakukan oleh pemerintah daerah dituntut untuk dapat menyelesaikan masalah ekonomi dan sosial masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk memahami dengan lebih mendalam dampak dari Kerjasama luar negeri yang dilakukan oleh pemerintah daerah terhadap keamanan manusia khususnya keamanan ekonomi. Penelitian ini juga bermanfaat untuk mengembangkan lebih jauh kajian tentang Kerjasama luar negeri yang dilakukan oleh pemerintah daerah, serta memberikan masukan untuk keberlanjutan Kerjasama luar negeri pemerintah daerah yang berorientasi kepada *people-centred*.

Tinjauan Pustaka

a. Kerjasama Internasional oleh Pemerintah Daerah

Kerjasama internasional yang dilakukan oleh pelaku sub-negara seperti kota, kabupaten, dan provinsi telah melahirkan konsep baru dalam hubungan internasional. Konsep ini disebut paradiplomasi. Paradiplomasi seringkali disamakan dengan istilah lain yang menggambarkan keterlibatan aktor sub-nasional dalam hubungan internasional. Istilah-istilah tersebut antara lain “diplomasi konstituen, diplomasi regional, diplomasi subnegara, mikrodiplomasi, diplomasi berlapis, diplomasi katalitik, protodiplomasi, pasca diplomasi, dan sebagainya (Kuznetsov, 2015).

Menurut Kutnezov, paradiplomasi diartikan sebagai “suatu bentuk komunikasi politik untuk mencapai keuntungan ekonomi, budaya, politik, atau jenis keuntungan lainnya, yang intinya terdiri dari tindakan-tindakan mandiri pemerintah daerah dengan aktor-aktor pemerintah asing dan non-pemerintah.” (Kuznetsov, 2015). Definisi tersebut menggambarkan bahwa tindakan pemerintah daerah bekerja sama dengan pihak asing di berbagai bidang merupakan kegiatan paradiplomasi.

Lebih lanjut, praktik paradiplomasi di Indonesia telah diatur secara jelas melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pedoman Umum Tata Cara Hubungan Internasional. Dalam pedoman tersebut disebutkan bahwa pemerintah daerah berhak bekerja sama di bidang kerja sama ekonomi, kerja sama sosial budaya, dan bentuk kerja sama lainnya (Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, 2014). Oleh karena itu, jelas terlihat bahwa kerjasama yang dilakukan oleh pemerintah daerah merupakan praktik paradiplomasi.

b. Keamanan Ekonomi

Konsep keamanan ekonomi merupakan bagian dari konsep besar keamanan manusia. Keamanan manusia adalah konsep yang muncul setelah Perang Dingin. Konsep ini tidak lepas dari peran Perserikatan Bangsa-Bangsa, karena konsep ini muncul dari Perserikatan Bangsa-Bangsa yang berupaya untuk berperan lebih aktif dalam upaya meminimalisasi ancaman terhadap kemanusiaan. Konsep ini merupakan konsep yang penting karena menunjukkan adanya perubahan dalam prioritas keamanan. Keamanan bagi

manusia merupakan prioritas utama dibandingkan keamanan negara.

Konsekuensi dari pergeseran ini adalah manusia menjadi pusat keamanan. Konsep keamanan semakin meluas, dimana segala sesuatu yang mengancam keberadaan manusia dapat dikategorikan sebagai ancaman terhadap keamanan manusia. United Nations Development Program (UNDP) mendefinisikan keamanan manusia sebagai:

Human security can be said to have two main aspects. It means, first safety from such chronic threats as hunger, disease, and repression. And second, it means protection from sudden and hurtful disruptions in the patterns of daily life – whether in-home, in jobs, or in communities. Such threats can exist at all levels of national income and development (UNDP, 1994).

Definisi tersebut menjelaskan bahwa aspek yang dapat mengancam secara tiba-tiba dikategorikan sebagai ancaman terhadap keamanan manusia. Keamanan manusia bukan hanya upaya perlindungan terhadap eksistensi manusia tetapi juga memberikan kekuatan dan pemberdayaan bagi manusia dan masyarakat sebagai inti dari keamanan (Wardoyo, 2015). Salah satu aspek yang mengancam adalah ancaman ekonomi. Ancaman ekonomi dibedakan menjadi dua ancaman utama, yaitu kemiskinan, dan pengangguran.

Di Indonesia, istilah human security belum begitu populer di kalangan pembuat kebijakan. Istilah keamanan sering kali dikaitkan dengan kesejahteraan. Sehingga istilah keamanan ekonomi juga bisa diartikan sebagai kesejahteraan ekonomi. Meski angka kemiskinan dan pengangguran di Indonesia mengalami penurunan, namun

masyarakat masih memandang pengangguran dan kemiskinan sebagai ancaman utama keamanan ekonomi (Alexandra, 2019). Selain itu, terdapat kesamaan persepsi bahwa pemerintah, baik di tingkat nasional maupun daerah, paling bertanggung jawab dalam menangani ancaman terhadap keamanan manusia, termasuk keamanan ekonomi (Alexandra, 2019). Pemerintah memiliki modalitas untuk memberdayakan dan mengatasi ancaman terhadap manusia.

Metodologi

a. Objek Penelitian

Objek penelitian dalam penelitian ini adalah masyarakat Provinsi Yogyakarta yang melaksanakan Program *Saemaul Undong* (Kerjasama Luar Negeri Provinsi Yogyakarta dan Provinsi Gyeongsangbuk-do) yaitu Desa Bleberan, Kabupaten Gunung Kidul, dan Desa Sumbermulyo, Kabupaten Bantul.

b. Populasi dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan elemen atau unsur yang akan diteliti. Populasi merupakan sekelompok orang, kejadian, atau benda yang dijadikan objek penelitian. Dengan kata lain, populasi adalah himpunan yang lebih besar yang akan menentukan sampel dari penelitian. Sampel adalah sebagian dari populasi. Penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*. *Purposive sampling* yaitu teknik pengambilan sampel dari populasi yang digunakan atas dasar pertimbangan peneliti sendiri. Sampel diambil dengan maksud dan tujuan tertentu. Menurut Neuman, *purposive sampling* sesuai untuk memilih kasus yang sangat informatif karena teknik

ini telah memiliki tujuan tertentu dalam pemikirannya (Neuman, 2011).

c. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian metode campuran dengan strategi Triangulasi. Strategi triangulasi adalah strategi dimana peneliti mengumpulkan data kualitatif dan kuantitatif secara konkuren, dan kemudian dibandingkan untuk mengetahui konvergensi, perbedaan, atau kombinasi (Creswell, 2007).

d. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan teknik studi literatur, survei, dan wawancara yang mendalam. Berbagai macam literatur mengenai Kerjasama luar negeri oleh pemerintah daerah, keamanan manusia digunakan sebagai bahan rujukan yang relevan dan valid dalam penelitian ini. Wawancara mendalam dilakukan dengan pihak yang terkait dan relevan. Survei dilakukan untuk mengetahui dampak dan opini masyarakat terhadap implementasi program *Saemaul Undong*.

e. Teknik Analisa Data

Teknik Analisa data yang dilakukan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara kualitatif dan kuantitatif. Berkaitan dengan data kuantitatif yang diperoleh melalui survei. Beberapa item survei akan dirancang menggunakan skala likert. Skala tersebut digunakan untuk mengukur sikap dan pendapat seseorang atau kelompok orang tentang fenomena sosial (Darmawan, 2014). Selanjutnya data

tersebut akan dianalisis dengan mengikuti langkah analisis data kualitatif menurut Moleong. Secara umum proses Analisa data kualitatif mencakup: reduksi data, kategorisasi data, sintesisasi, dan menyusun hipotesis kerja (Moleong, 2014). 1) Reduksi data dilakukan dengan cara melakukan identifikasi pada satuan terkecil dalam data yang memiliki makna bila dikaitkan dengan masalah penelitian. Kemudian dilakukan *coding* terhadap satuan terkecil tersebut, agar dapat ditelusuri satuan tersebut berasal darimana. 2) Kategorisasi dilakukan untuk memilah setiap satuan ke dalam bagian-bagian yang memiliki kesamaan yang selanjutnya diberikan pelabelan. 3) Sintesisasi berarti mencari kaitan antara satu kategori dengan kategori yang lain, yang selanjutnya diberikan pelabelan. 4) menyusun hipotesis kerja merupakan upaya untuk merumuskan suatu pernyataan yang proporsional, dimana hipotesis kerja tersebut terkait dan dapat menjawab pertanyaan penelitian (Moleong, 2014).

Pembahasan

a. Kerjasama Luar Negeri oleh Pemerintah Daerah di Indonesia

Kerjasama luar negeri yang dilakukan oleh pemerintah daerah menjadi alternatif kebijakan pemerintah daerah pasca berakhirnya rezim orde baru. Orde Reformasi menjadi momen yang baik bagi berkembangnya kerjasama luar negeri. Pada era ini desentralisasi kekuasaan mulai dijalankan sebagai manifestasi dari demokrasi Indonesia yang mulai berkembang. Salah satu wujud nyata dari desentralisasi tersebut adalah dengan disahkannya Undang-undang tentang Pemerintahan daerah.

Melalui Undang-undang tersebut, Pemerintah Daerah diberikan wewenang oleh pemerintah pusat untuk menyelenggarakan

pemerintahan berdasarkan pada asas otonomi daerah, desentralisasi, dan dekonsentrasi (Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, 2014). Undang-Undang tersebut memberikan ruang kepada pemerintah daerah untuk melakukan kerjasama dengan lembaga atau pemerintah di luar negeri dalam upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektifitas pelayanan publik (Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, 2014). Kerjasama yang dapat dilakukan pemerintah daerah meliputi (i) pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; (ii) pertukaran budaya; (iii) peningkatan kemampuan teknis dan manajemen pemerintahan; (iv) promosi potensi daerah, dan (v) kerjasama lainnya yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang (Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, 2014).

Landasan hukum yang diberikan oleh Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah tersebut memberikan ruang yang sangat luas bagi pemerintah daerah untuk melakukan kerjasama luar negeri. Pemerintah daerah baik kota dan provinsi dari Sabang sampai Merauke dapat melakukan kerjasama luar negeri dengan berbagai pihak. Berikut ini adalah pemerintah daerah yang telah melakukan kerjasama luar negeri:

Table I. Kerjasama Luar Negeri Oleh Pemerintah Daerah

No	Pemerintah Daerah Yang Melakukan Kerjasama Luar Negeri
1	Provinsi DKI Jakarta
2	Provinsi Jawa Barat
3	Provinsi Jawa Tengah

No	Pemerintah Daerah Yang Melakukan Kerjasama Luar Negeri
4	Provinsi Jawa Timur
5	Provinsi Banten
6	Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
7	Provinsi Nagroe Aceh Darussalam
8	Provinsi Sumatera Utara
9	Provinsi Sumatera Barat
10	Provinsi Kepulauan Riau
11	Provinsi Bali
12	Provinsi Maluku
13	Provinsi Papua
14	Kota Bandung
15	Kota Bogor
16	Kota Surabaya
17	Kota Medan
18	Kota Padang
19	Kota Surakarta
20	Kabupaten Bantul
21	Kota Ambon
22	Kota Bukit Tinggi
23	Kota Makassar
24	Kota Kendari

Sumber: Diolah dari berbagai sumber

Pemerintah Daerah melakukan berbagai kerjasama luar negeri, sebagaimana tergambar dalam tabel diatas. Secara praktik, kerjasama luar negeri yang dilakukan oleh pemerintah daerah dapat dibagi dalam tiga model kerjasama. Tiga model tersebut, menurut Jawahir Thontowi adalah (i) perjanjian kerjasama antara pemerintah daerah dengan pemerintah daerah luar negeri

(*government to government*); (ii) kerjasama pemerintah daerah dengan swasta asing; (iii) kerjasama pemerintah daerah dengan Lembaga swadaya masyarakat (LSM) asing (Thontowi, 2009). Mengacu pada tiga model tersebut, model kerjasama yang paling banyak dilakukan oleh pemerintah daerah adalah model kerjasama *government to government*. Kerjasama tersebut umumnya terwujud dalam kerjasama kota kembar (*sister city*) atau provinsi kembar (*sister province*).

Kerjasama pemerintah daerah dalam bentuk kota/provinsi kembar merupakan kerjasama luar negeri yang banyak dilakukan oleh pemerintah daerah di Indonesia. Beragam bidang kerjasama dilakukan oleh pemerintah daerah dalam kerangka kerjasama ini. Kerjasama dilakukan dalam berbagai bidang seperti pendidikan, pariwisata, budaya, investasi, perdagangan, ekonomi, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Bidang kerjasama luar negeri yang dilakukan oleh pemerintah daerah sangat beragam. Meskipun demikian, kerjasama luar negeri dibidang ekonomi, perdagangan, investasi adalah bidang utama dalam kerjasama luar negeri. Pemerintah daerah berusaha untuk menjalin kerjasama dibidang ekonomi baik dengan pemerintah daerah, swasta, atau dengan INGO.

b. Kerjasama Luar Negeri oleh Pemerintah Daerah Provinsi Yogyakarta

Sebagaimana disebutkan sebelumnya, bahwa berbagai pemerintah daerah di Indonesia melakukan kerjasama luar negeri. Salah satu yang melakukan kerjasama tersebut adalah Pemerintah Provinsi (Pemprov) Yogyakarta. Kerjasama yang dilakukan oleh

Pemprov Yogyakarta tidak hanya kerjasama antar pemerintah daerah, tetapi juga kerjasama dengan pihak swasta asing dan Lembaga swadaya masyarakat (LSM) luar negeri. Meskipun demikian, mayoritas kerjasama luar negeri yang dilakukan oleh Pemprov Yogyakarta berbentuk kerjasama antar pemerintah daerah.

Pemprov Yogyakarta melakukan kerjasama luar negeri pertama kali pada tahun 1985. Kerjasama luar negeri tersebut dijalin dengan Prefektur Kyoto, Jepang. Hingga tahun 2019, Pemprov Yogyakarta telah memiliki 31 kerjasama luar negeri yang meliputi berbagai bidang mulai dari ekonomi, pariwisata, seni, budaya, infrastruktur, pendidikan, dan Iptek. Berikut ini adalah daftar kerjasama luar negeri yang dilakukan oleh Pemprov Yogyakarta.

Table II. Kerjasama Internasional Pemda Yogyakarta

No	Provinsi / Negara	Tahun
1	Prefektur Kyoto / Jepang	1985
2	Ismailia / Mesir	1990
3	Negara Bagian California / AS	1997
4	East Asia Tourism Organization Forum	1999
5	Land Tyrol / Austria	1999
6	Surugawa Miyagawa	2003
7	Karsruhe University / Jerman	2004
8	Chungcheongnam-do / Korea Selatan	2004
9	Gyeongsangbuk-do / Korea Selatan	2005
10	Medical Peace Foundation	2007
11	International Finance Corporation	2007
12	Chiang Mai / Thailand	2007
13	Gang-won / Korea Selatan	2008
14	HNA Group / Cina	2009

15	East Asia Local and Regional Congress	2010
16	Saint-Petersburg / Russia	2010
17	Juma' Al Majid / UEA	2011
18	Dongbu Engineering	2012
19	Kayseri / Turki	2013
20	Vereginig Herdenking Javaanse	2013
21	Shanghai / Cina	2014
22	Adelaide Festival Centre / Australia	2015
23	The State of Victoria / Australia	2015
24	AIC, Monash University / Australia	2015
25	Prefektur Yamanashi / Jepang	2015
26	Welfaliske Wilhems	2015
27	Shanghai Theater Academy / Cina	2016
28	Inonesienne d Nouvelle Caledonia	2016
29	Victoria / Australia	2017
30	Melbourne Symphony Orchestra / Australia	2017
31	Singapore International Foundation	2017

Sumber: Diolah dari berbagai sumber

Dilihat dari tabel diatas, terlihat bahwa Pemprov Yogyakarta relatif aktif dalam melakukan kerjasama luar negeri, khususnya pasca orde baru. Pemprov Yogyakarta memiliki 25 kerjasama yang terjalin di era reformasi tersebut. Namun demikian, Pemprov Yogyakarta juga memiliki masalah dalam implementasi kerjasama tersebut. Masalah yang seringkali dihadapi oleh Pemprov adalah masalah keberlanjutan, dimana kerjasama luar negeri hanya berhenti pada tataran legal formal, tanpa implementasi. Menurut Joko Hariyono, Ketua Seksi Kerjasama Pemprov DIY, masalah keberlangsungan kerjasama luar negeri adalah hal yang penting, dimana pemerintah daerah harus mampu memperhitungkan

dengan seksama apakah kerjasama tersebut dapat ditindaklanjuti atau hanya berakhir pada “pencitraan.” (Hariyono, interview, Juli 2019). Seringkali birokrat di lingkungan Pemerintah daerah tidak melihat kerjasama luar negeri sebagai suatu hal yang strategis yang dapat mendukung pembangunan dan kesejahteraan. Birokrat tersebut justru melihat kerjasama luar negeri sebagai beban kerja tambahan. Hal ini menyebabkan kerjasama luar negeri tidak dapat berjalan dan tidak ada keberlanjutan.

Kondisi tersebut juga menggambarkan dalam kerjasama luar negeri yang dilakukan oleh Pemprov Yogyakarta. Saat ini, hanya ada 5 kerjasama luar negeri yang bertahan dan masih berlanjut. Kerjasama luar negeri tersebut adalah kerjasama dengan pemerintah Victoria, Australia; Prefektur Kyoto dan Yamanashi, Jepang, Provinsi Gangwon dan Gyeongsangbuk-do, Korea Selatan (Hakiem & Susilowati, 2020). Dari kelima kerjasama tersebut, kerjasama Pemprov Yogyakarta dan Provinsi Gyeongsangbuk-do yang paling familiar dimasyarakat. Kerjasama yang dibangun dengan Provinsi Gyeongsangbuk-do adalah kerjasama provinsi kembar (*sister province*). Melalui kerjasama provinsi kembar inilah lahir program yang dikenal dengan nama *Saemaul Undong*.

c. Implementasi Program *Saemaul Undong*

Program *Saemaul Undong* adalah salah satu program yang lahir dari kerjasama luar negeri antara Pemprov Yogyakarta dan Provinsi Gyeongsangbuk-do. Pemprov Yogyakarta dan Provinsi Gyeongsangbuk-do telah mengupayakan kerjasama luar negeri sejak tahun 2001. Kedua provinsi kemudian menyepakati untuk melakukan penandatanganan *Letter of Intent* pada tahun 2003 (*DIY - Gyeongsangbuk-*

Do, n.d.). Kedua pihak kemudian semakin mempererat hubungannya dengan penandatanganan *Memorandum of Understanding* untuk bekerjasama dalam kerangka Provinsi Kembar (*sister province*) pada tahun 2005 (*DIY - Gyeongsangbuk-Do*, n.d.).

Sejak tahun 2007, kedua belah pihak telah berupaya untuk melakukan penjajakan untuk mengimplementasikan program *Saemaul Undong*. Program ini disepakati untuk dijalankan oleh kedua belah pihak pada tahun 2008 (*DIY- Gyeongsangbuk-Do*, n.d.). Program tersebut merupakan program yang berusaha untuk memberikan program-program yang berbasis pemberdayaan kepada masyarakat. Program ini mendorong kemandirian masyarakat sehingga dapat memberikan manfaat dan penguatan terhadap keamanan ekonomi. Program ini mendorong dijalkannya program pemberdayaan ekonomi seperti pelatihan bertani, pendidikan, dan menjalankan organisasi pertanian ("*Saemaul Globalization Foundation*", n.d.). Melalui program ini diharapkan mampu mengurangi kesenjangan antara desa dan kota.

Program *Saemaul Undong* mulai diimplementasikan di Yogyakarta sejak 2008. Tercatat program ini telah dilaksanakan di beberapa kabupaten yaitu Kabupaten Bantul, Kulonprogo, dan Gunungkidul (*DIY - Gyeongsangbuk-Do*, n.d.). Hingga tahun 2012, terdapat 5 daerah yang telah melaksanakan program *Saemaul Undong* yaitu Desa Kampun, dan Desa Pacarejo, Kabupaten Gunungkidul; Desa Salamrejo dan Banjaroyo, Kabupaten Kulonprogo; dan Desa Karangtalun, Kabupaten Bantul ("*Dari International Symposium*", 2010; *DIY - Gyeongsangbuk-Do*, n.d.).

Pada tahun 2015, program ini dilaksanakan ditiga desa yaitu Desa Sumbermulyo, Kabupaten Bantul, Desa Bleberan dan Desa

Ponjong Kabupaten Gunungkidul. Program ini direncanakan akan berjalan hingga 5 tahun kedepan. Kegiatan-kegiatan yang dijalankan melalui program ini difokuskan pada pemberdayaan masyarakat, seperti usaha peningkatan ekonomi, bantuan pembangunan fisik, dan peningkatan kualitas fisik. Beberapa program yang berhasil dijalan seperti budidaya Jamur, penyediaan teknologi pengelolaan air bersih (PAB), pendampingan pertanian di desa Bleberan (Lurah Desa Bleberan, interview, 15 September 2020). Kemudian pengelolaan sampah dan pendampingan pertanian beras organik di Desa Sumbermulyo (Carik Desa Sumbermulyo, interview, 21 September 2020).

Program yang telah dijalankan bukan berarti tanpa kendala. Program ini sempat terhenti di desa Sumbermulyo pada tahun 2017, dan baru akan dimulai kembali pada tahun 2020 khususnya dalam pengelolaan sampah. Desa Bleberan yang relatif berhasil dalam pelaksanaan program ini juga mengalami kendala, khususnya bahwa kapasitas sumber daya manusia yang belum mendukung dengan baik program. Kondisi tersebut menyebabkan program belum berjalan dengan maksimal. Menurunnya kesadaran akan pentingnya gotong royong menjadi masalah yang pelik dalam pelaksanaan program ini. Namun demikian, terlepas dari beberapa kendala yang dihadapi, program *Saemaul Undong* di Bleberan relatif berhasil, dan akan mengalami perpanjangan untuk dua atau tiga tahun kedepan.

Program *Saemaul Undong* telah berjalan selama 5 tahun di Desa Bleberan. Pada tahun pertama, program ini memfokuskan diri pada berbagai pelatihan-pelatihan yang bertujuan untuk mendorong penguatan kapasitas Sumber Daya Masyarakat. Selain itu pada

tahun pertama juga banyak dilakukan sosialisasi-sosialisasi kegiatan yang menjadi program *Saemaul Undong*. Pada tahun kedua, fokus program mulai beralih pada pelaksanaan program pembangunan sarana dan prasarana, seperti pembangunan Gedung serbaguna, teknologi pengelolaan air bersih, renovasi PAUD. Tahun ketiga, program mulai menjalankan program-program pemberdayaan yang bertujuan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat, seperti budidaya jamur, *green house*, yang terus berkembang hingga tahun 2020. Selain itu, terdapat rencana untuk membangun “Jamur Centre” agar desa Bleberan bisa menjadi pusat Jamur di Gunungkidul (Carik Desa Bleberan, interview, 22 September 2020).

d. Dampak Program Saemaul Undong terhadap Keamanan Ekonomi

Sebagai salah satu program yang berjalan dibawah naungan kerjasama provinsi kembar, Program *Saemaul Undong* memberikan dampak terhadap masyarakat yang menjadi kelompok sasarannya. Program ini memberikan kesan dan pengaruh yang positif bagi masyarakat yang berada di akar rumput (*grassroot*). Masyarakat yang terlibat dalam program di Desa Bleberan dan Sumbermulyo menilai bahwa program ini memberikan dampak positif sehingga program ini diharapkan dapat berkelanjutan.

Fig. 1. Respon Masyarakat terhadap keberlangsungan program Saemaul Undong



Sumber: Diolah dari berbagai sumber

Respon positif tersebut tidak terlepas dari fakta bahwa program ini dinilai memiliki dampak terhadap kesejahteraan masyarakat atau keamanan ekonomi. Program pembangunan fisik, dalam hal ini teknologi pengelolaan air bersih (PAB) misalnya, memberikan daya tahan yang nyata bagi masyarakat di desa Bleberan. Jika sebelumnya masyarakat harus mengeluarkan uang hingga Rp.600.000,-/bulan untuk memastikan ketersediaan air bersih, maka dengan PAB masyarakat bisa menghemat pengeluaran hingga Rp.500.000,-/bulan (Lurah Desa Bleberan, interview, 15 September 2020). Menurut Puspitasari dkk, pada level mikro program Saemaul Undong mampu meningkatkan pendapatan masyarakat mulai dari Rp. 500.000,- s.d 1.400.000,-/kelompok (Puspitasari et al., 2019).

Fig. 2. Peningkatan ekonomi masyarakat



Sumber: Diolah dari berbagai sumber

Program Saemaul Undong berhasil memberikan dampak terhadap penguatan keamanan ekonomi. Namun demikian bukan berarti program ini berjalan tanpa celah. Implementasi program ini dinilai belum berdampak secara maksimal. Program ini belum mampu memberikan kesejahteraan ekonomi secara merata. Para *stakeholder* yang terlibat dalam program ini baik yang berada di Desa Bleberan dan Sumbermulyo sepakat bahwa program ini belum berjalan maksimal. Menurut Puspitasari dkk, program ini memberikan manfaat paling besar bagi pemerintah desa, dan penduduk yang terlibat dalam pelaksanaan program. Namun program ini belum menjangkau warga yang tidak terlibat dalam pelaksanaan program tersebut (Puspitasari et al., 2019). hal ini juga senada dengan temuan dilapangan dimana masyarakat merasakan bahwa program ini tidak terlalu berdampak bagi masyarakat yang tidak terlibat dalam program.

Fig. 3. Dampak bagi masyarakat yang tidak terlibat



Sumber: Diolah dari berbagai sumber

Berdasarkan gambaran tersebut, dapat terlihat dengan jelas bahwa program *Saemaul Undong* sebagai manifestasi dari kerjasama internasional Yogyakarta dan Gyeongsanbyuk-do memiliki dampak yang positif terhadap penguatan keamanan ekonomi masyarakat. Meskipun dampaknya yang ditimbulkan relatif belum terlalu signifikan, tetapi kerjasama internasional berbasis pemberdayaan masyarakat ini berhasil memberikan perubahan yaitu penguatan ekonomi bagi masyarakat yang terdampak.

Kesimpulan

Kerjasama internasional yang dilakukan oleh Pemerintah daerah berpotensi memiliki peran strategis dalam mendukung penguatan aspek keamanan ekonomi. Hal tersebut tergambarkan dalam implementasi program *Saemaul Undong* sebagai salah satu bentuk program hasil kerjasama antara Pemerintah Yogyakarta dan Provinsi Gyeongsangbuk-do, Korea Selatan. Meskipun belum

berjalan maksimal, berbagai program Saemaul Undong berhasil meningkatkan perekonomian masyarakat. Program budidaya jamur, *green house*, beras organik, pembangunan fisik, dan berbagai pemberdayaan lainnya berhasil meningkatkan kapasitas sumber daya manusia di wilayah tersebut. Dengan kata lain, program tersebut menguntungkan masyarakat yang terdampak. Masalah yang muncul dari implemtasi tersebut adalah masalah kesejahteraan ekonomi yang belum bisa merata. Peningkatan ekonomi tersebut lebih banyak dirasakan oleh Pemerintah desa dan masyarakat yang terlibat. Program ini sebagai manifestasi kerjasama luar negeri tidak terjebak pada kerjasama-kerjasama yang bersifat seremonial. Kerjasama ini mampu dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, meskipun belum maksimal. Melalui program tersebut, dapat dilihat bahwa kerjasama luar negeri yang dilakukan oleh pemerintah daerah dapat menjadi instrumen yang mendukung pembangunan, kemajuan, kesejahteraan, keamanan manusia. Kerjasama luar negeri tersebut tidak berakhir pada kegiatan-kegiatan seremonial yang tidak memiliki dampak positif khususnya dampak ekonomi bagi masyarakat. Pemerintah Daerah di Indonesia harus berusaha untuk mendorong kerjasama internasional yang mengikat dan kuat, yang mampu diimplementasikan dan berorientasi pada pemberdayaan masyarakat, sehingga pemenuhan terhadap aspek keamanan ekonomi dapat terpenuhi.

Daftar Pustaka

Alexandra, L. A. (2019). Perceptions on Human Security: An Indonesian View. In Y. Mine, O. A. Gómez, & A. Muto (Ed.), *Human Security Norms in East Asia* (hal. 67–89). Palgrave

- Macmillan. <https://doi.org/10.1007/978-3-319-97247-3>
- Creswell, J. W. (2007). *Research Design: Qualitative, Quantitative and Mixed Method Approaches*. SAGE Publications. <https://doi.org/10.4135/9781849208956>
- Dari International Symposium on Saemaul Undong: Gerakan untuk Desa-Desa di Provinsi DIY | Universitas Gadjah Mada*. (2010). <https://ugm.ac.id/id/berita/2677-dari-international-symposium-on-saemaul-undong-gerakan-untuk-desadesa-di-provinsi-diy>
- Darmawan, D. (2014). Metode Penelitian Kuantitatif. In *Rosda*. <https://doi.org/10.4324/9780203134566-13>
- Data Perjanjian Luar Negeri*. (n.d.). Diambil 29 September 2019, dari <https://treaty.kemlu.go.id/search>
- DIY - Gyeongsangbuk-Do*. (n.d.). Diambil 14 September 2020, dari <http://jogjainvest.jogjaprov.go.id/diy---gyeongsangbuk-do.html>
- Hakiem, F. N., & Susilowati, I. (2020). Kerjasama Luar Negeri Pemerintah Daerah Dalam Mendukung Penguatan Keamanan Manusia (Studi Kasus Kerjasama Luar Negeri Pemprov D.I. Yogyakarta). *Dauliyah Journal of Islamic and International Affairs*, 5(1), 49. <https://doi.org/10.21111/dauliyah.v5i1.4274>
- Isnaeni, N. (2013). Peran Strategis Pemerintah Daerah dalam Kerja Sama Internasional untuk Pembangunan Berkelanjutan. *Global & Strategis*, 1(7), 123–138. <http://journal.unair.ac.id/download-fullpapers-12-123-138-Nurul-Isnaeni-Peran-Strategis-Pemerintah-daerah-dalam-Kerjasama-Internasional-untuk-Pembangunan-Berkelanjutan-ok.pdf>

- Kerjasama Luar Negeri Aktif*. (n.d.). Diambil 14 September 2020, dari <https://www.jogjainvest.jogjaprovo.go.id/kerjasama-luar-negeri-aktif.html>
- Korea Saemaul Undong Center*. (n.d.). Diambil 28 Agustus 2020, dari <https://www.saemaul.or.kr/eng/sub/whatSMU/definition.php>
- Kuznetsov, A. (2015). Theory and Practice of Paradiplomacy. In *Theory and Practice of Paradiplomacy*. Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781315817088>
- Moleong, L. J. (2014). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Rosda.
- Neuman, W. L. (2011). Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches. In *Pearson Education*.
- Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kementerian Sekretariat Negara RI (2014). <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>
- Puspitasari, D. C., Satriani, R., & Pmungkas, S. B. (2019). Pengembangan Kapasitas Masyarakat Partisipatif: Studi Implementasi Program Saemaul Undong di Kabupaten Gunung Kidul DIY. *Jurnal Sosiologi Pendidikan Humanis*. <https://doi.org/10.17977/um021v4i1p1-13>
- Saemaul Globalization Foundation (SGF): Mendukung Program Desa Lestari di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta – Penabulu Foundation*. (n.d.). Diambil 28 Agustus 2020, dari <https://penabulufoundation.org/saemaul-globalization-foundation-sgf-mendukung-program-desa-lestari-di-provinsi-daerah-istimewa-yogyakarta/#toggle-id-4>
- Tavares, R. (2016). *Paradiplomacy; Cities and States as Global Players*. Oxford University Press.

- Thontowi, J. (2009). Kewenangan Daerah Dalam Melaksanakan Hubungan Luar Negeri (Studi Kasus di Propinsi Jawa Barat dan DIY). *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 16(2), 149–168. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol16.iss2.art1>
- UNDP. (1994). Human Development Report 1994. In *Oxford University Press*.
- Wardoyo, B. (2015). *Perkembangan, Paradigma, dan Konsep Keamanan Internasional dan Relevansinya Untuk Indonesia*. Nugra Media.